



PUTUSAN

Nomor 1237/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. HALEF JAROT DHARRESTA, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-2644/PJ./2014 Tanggal 10 Oktober 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. ANUGERAH PASIFIC JAYA, tempat kedudukan Jalan Kalianget 10-12 Blok A-7, Surabaya;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53591/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Nomor: APJ/12/Banding/XI/2012 tanggal 26 November 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;
Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

A. Pemenuhan Ketentuan Formal dan alasan formal :

1. Bahwa persyaratan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Surat Banding diajukan terhadap Surat Keputusan Terbanding No: KEP-1399/WPJ.24/2012 tanggal 05 September 2012, diterima tanggal 19 September 2012, sehingga masih dalam jangka waktu 3 bulan;

2. Bahwa Surat Keputusan Terbanding No. KEP-1399/WPJ.24/2012 tanggal 05 September 2012 diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 19 September 2012, sedangkan Surat Keberatan Pemohon Banding atas SKBKB PPN No. 00119/207/07/603/11 tanggal 06 Juli 2011 Masa Pajak Desember 2007 diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat tanggal 8 September 2011 berdasarkan LPAD Nomor: S-2046/WPJ.24/KP.0103/2011 tanggal 8 September 2011;

Bahwa dihitung dari tanggal terima surat permohonan oleh KPP Pratama Sidoarjo Barat sampai diterimanya Surat Keputusan Terbanding No. KEP-1399/WPJ.24/2012 tanggal 05 September 2012 yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 19 September 2012, berarti telah melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Tahun 2009 Pasal 26 ayat (1);

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 26 ayat (5) Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan;

3. Bahwa persyaratan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2002: Pembayaran sebesar 50% dari pajak yang terutang;

Bahwa dengan demikian permohonan banding telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat(4) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2002;

B. Material Banding

Bahwa berdasarkan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak, Terbanding melakukan koreksi sebagai berikut :

1. Koreksi DPP atas Penyerahan BKP/JKP sebesar Rp. 1.383.083.090,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbanding (Pemeriksa) menghitung DPP atas Penyerahan BKP/JKP sebesar Rp1.383.083.090,00 dan oleh Terbanding (Penelaah) keberatan DPP atas Penyerahan BKP/JKP tersebut dihitung kembali menjadi Rp. 1.383.083.090,00 sehingga koreksi sebelum dan setelah keberatan sebagai berikut:

Koreksi awal :

DPP atas Penyerahan BKP/JKP	Rp. 1.383.083.090,00
cfm Terbanding (Pemeriksa)	
DPP atas Penyerahan BKP/JKP	Rp. 0,00
cfm SPT/ Pemohon Banding	
Jumlah Koreksi	Rp. 1.383.083.090,00

Koreksi setelah Keputusan Keberatan :

DPP atas Penyerahan BKP/JKP cfm	Rp. 1.383.083.090,00
Terbanding (Penelaah), exclude PPN	
DPP atas Penyerahan BKP/JKP cfm	Rp. 0,00
SPT/ Pemohon Banding	
Jumlah Koreksi	Rp. 1.383.083.090,00

Bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan menghitung seluruh penerimaan sebagai DPP atas Penyerahan JKP, sedangkan Terbanding menghitung seluruh penerimaan cfm Terbanding sebagai DPP atas Penyerahan JKP;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi Terbanding Rp.1.383.083.090,00 tersebut dikarenakan atas aktivitas usaha dari Pemohon Banding bukan merupakan objek dari PPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dimana penjualan Jasa Pemohon Banding saat itu adalah tidak berdasarkan suatu perjanjian kontrak yang mengharuskan Pemohon Banding melayani satu pemakai jasa atau satu tujuan saja (siapa saja boleh mengorderkan barangnya untuk dimuat yang harga freightnya nanti dihitung atas dasar per Kg atau per Ton) bukan Time Charter dimana seluruh space kapal hanya di booking oleh satu orang/satu perusahaan saja dan harga freightnya tidak lagi berdasarkan harga per Kg atau per Ton, tetapi berdasarkan harga kontrak atas seluruh space kapal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, sehingga sesuai ketentuan tersebut di atas bahwa usaha Pemohon Banding merupakan Jasa di bidang Angkutan Umum yang tidak dikenakan PPN;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Banding tidak dapat menerima penghitungan SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2007 dalam Keputusan Terbanding No.KEP-1399/WPJ.24/2012 tanggal 05 September 2012 SKPKB PPN No.00119/207/07/603/11 tanggal 06 Juli 2011;

Bahwa oleh karenanya dengan ini Pemohon Banding memohon kepada Majelis untuk dapat memeriksa penghitungan PPN tersebut dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

Bahwa perhitungan PPN terutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

DPP atas Penyerahan JKP	Rp.	0,00
PPN Terutang	Rp.	0,00
Kredit Pajak	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Pajak kurang (lebih) dibayar	Rp.	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.53591/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1399/WPJ.24/2012 tanggal 05 September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2007 Nomor 00119/207/07/603/11 tanggal 06 Juli 2011, atas nama PT Anugerah Pasific Jaya, NPWP 01.918.493.6-603.000, beralamat di Jl. Kalianget 10-12 Blok A-7, Surabaya, dengan penghitungan menjadi sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	-
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	-
3	Kredit Pajak	-
4	PPN yang kurang dibayar	-
5	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	-
6	Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar	-

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.53591/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014, diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 24 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-2644/PJ./2014 tanggal 10 Oktober 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 17 Oktober 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 17 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 23 September 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 09 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

1. Tentang Formal Penerbitan Putusan a quo
2. Tentang Sengketa Koreksi DPP PPN berupa penyerahan JKP Masa Pajak Desember 2007 sebesar Rp1.383.083.090,00 yang tidak dipertahankan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 53591/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan sengketa Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (contra legem), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan pertimbangan – alasan sebagai berikut :

A. Tentang Formal Penerbitan Putusan a quo

1. Bahwa Surat Banding Nomor: APJ/12/Banding/XI/2012 tanggal 26 November 2012, diterima oleh sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 28 November 2012.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 53591/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 diputus pada tanggal 16 Desember 2013, sebagaimana yang tertuang pada halaman 48 Putusan a quo yang menyebutkan bahwa : Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013..... dst;
3. Bahwa ketentuan Pasal 81 UU Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa:
 - (1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.
 - (2) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima.
 - (3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa faktanya tidak terdapat Keputusan dari Ketua Pengadilan Pajak untuk memperpanjang jangka waktu persidangan.
5. Bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 53591/PP/M.VA/16/2014 diambil melebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak, dan oleh karenanya terdapat cukup alasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan peninjauan kembali terkait hal tersebut ke Mahkamah Agung RI sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak

B. Tentang Sengketa Koreksi DPP PPN berupa penyerahan JKP Masa Pajak Desember 2007 sebesar Rp1.383.083.090,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPN berupa penyerahan JKP Masa Pajak Desember 2007 sebesar Rp1.383.083.090,00 dengan didasarkan pada adanya fakta bahwa jasa yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UU PPN dan bukan merupakan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 KMK Nomor 527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003 jo. PMK Nomor 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusan a quo membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan menyampaikan pertimbangan hukum dan pendapat sebagai berikut :
Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding merupakan Perusahaan Angkutan Laut yang memindahkan barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain dan untuk sengketa ini, Pemohon Banding terbukti mengangkut barang milik dari beberapa perusahaan dan tidak hanya milik satu perusahaan saja, dengan demikian jasa yang diberikan Pemohon Banding adalah pelayaran umum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga jasa pengangkutan yang dilakukan oleh Pemohon Banding bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai;
bahwa oleh karena jasa pengangkutan yang dilakukan oleh Pemohon Banding bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan PPN Masa Pajak Desember 2007 atas penyerahan jasa angkutan laut sebesar Rp1.383.083.090,00 tidak dapat dipertahankan;
3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 53591/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat

Halaman 7 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1237/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana diuraikan di atas dengan alasan sebagai berikut:

3. 1. Bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan mengatur sebagai berikut:

- ☐ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.

Pasal 2 ayat (1)

(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

(2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

(4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) ";

(4a) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelumnya diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak";

Pasal 13 ayat (1) huruf e

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).

Pasal 13 ayat (2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

- ❑ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur:

Pasal 1 angka (2)

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

Pasal 1 angka (5)

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan";

Pasal 1 angka (15)

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 3A ayat (1)

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Pasal 4 huruf c

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Pasal 4A ayat (1)

Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"

Pasal 4A ayat (3) huruf i

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

i. jasa angkutan umum di darat dan di air";

- ☐ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain mengatur:



Pasal 5 huruf (i)

Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah: 'jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air';

Pasal 13

Jenis jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf i adalah jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di sungai dilakukan oleh Pemerintah atau swasta";

- ☐ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Pasal 24

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak.

- ☐ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang tidak Dikenakan PPN, antara lain mengatur:

Pasal 1 angka (12)

Jasa Angkutan Umum Di Laut adalah setiap kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kapal, yang dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Laut, dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan kepelabuhan lain, dengan dipungut bayaran";



Pasal 1 angka (13)

Pengusaha Angkutan Laut adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan usaha angkutan laut";

Pasal 2 ayat (1)

Atas penyerahan jasa Angkutan Umum di darat dan di air tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai";

Pasal 2 ayat (3)

Penyerahan jasa Angkutan Umum di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan jasa Angkutan Umum di laut, penyerahan jasa Angkutan Umum di sungai dan danau, dan penyerahan jasa Angkutan Umum penyeberangan";

Pasal 5

(1) Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan jasa Angkutan Umum di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah penyerahan Jasa Angkutan Laut yang dilakukan dengan cara:

- a. ada perjanjian lisan atau tulisan; dan
- b. Kapal dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan atau untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan Laut, dalam satu perjalanan (trip).

(2) Tidak termasuk dalam pengertian perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tiket, bill of lading, konosemen, dokumen pengangkutan di air, karcis atau bukti pembayaran Jasa Angkutan penumpang Kapal.

3. 2. Bahwa yang menjadi dasar dilakukannya koreksi DPP PPN atas penyerahan JKP tersebut adalah dengan didasarkan pada dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta keterangan berupa:

- a. Surat izin Berlayar (Port Clearance) No. GM.760/559/B/An.Dku/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh Syahbandar Kantor Adpel Pekanbaru Departemen



- Perhubungan tentang izin berlayar kapal KM. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), nahkoda Imam Hidayat, tujuan: Pelabuhan Perawang, Pekanbaru - Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya;
- b. Cargo Manifest Voy. tanpa nomor tanggal 12 Februari 2007 diketahui Kapal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengangkut barang dengan shipper (Pengirim) PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang, Consignee (Penerima barang) PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. dengan jenis barang Wood Pulp sebanyak 2.600 bales dan berat 650.000ADMT;
- c. Cargo Manifest Voyage No. :- tanggal 12 Februari 2007 diketahui Kapal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengangkut barang dengan shipper (Pengirim) PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry di Jambi, Consignee (Penerima barang) PT. Pabrik Kertas Tjiwikimia Tbk. di Sidoarjo dengan jenis barang Pulp sebanyak 2.400 bales dan berat 600ADT;
- d. Surat izin Berlayar (Port Clearance) No. M.I/KM. 17/109/08/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Syahbandar Kantor Kuala Tungkal Adpel Jambi Departemen Perhubungan tentang izin berlayar untuk kapal KM. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari Palembang ke Tanjung Perak, Surabaya;

No	Jenis Dokumen	Nama Costumer	Jumlah Jasa yang dibayar (Rp)
1	Manifest of Cargo Shipped Sailing on 27 Agustus 2007. KM. Trans Jaya (PT. Anugerah Pasific Jaya) Master: L. Mamuko. (From: Kuala Tungkal, Jambi - To: Tanjung Perak, Surabaya) Yang mengeluarkan manisfest PT. Bahtera Permata Wahana Cabang Kuala Tungkal;	1) PT. TjiwiKimiaTbk. 2) PT. Lontar Papyrus	100.350.000 11.062.240 111.412.240 Document yang menyertai invoice, BL (Agt 2007)
2	Manifest of Cargo Shipped PER: KM Nantai Sailing on: 10 September 2007 Master: Mardiansyah (From: Kuala Tungkal, Jambi - To: Tanjung Perak, Surabaya)	1) PT. Lontar Papyrus 2) PT. TjiwiKimiaTbk.	13.046.957 47.945.000 60.991.957



			Document yang menyertai invoice, BL, dan bukti potong PPh Final
3	Manifest of Cargo Shipped Sailing on: 07/05/2008 KM KTC - 1 Master Is Master Dari Perawang, Pekanbaru - Ke Tanjung Perak, Surabaya. Yang mengeluarkan Manifest: PT. Pelayaran Sri Indrapura, Pekanbaru.	1) PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Perawang. 2) PT. TjiwiKimiaTbk.	275.250.000 6.174.400 281.424.400 Dokumen yang menyertai invoice dan BL, 07/05/08
4	Manifest of Cargo Shipped Sailing on: 08/04/2008 KM Anugerah Pasific Jaya Master: Nawawi Dari Kuala Tungkal, Jambi - Ke Tanjung Perak, Surabaya. Yang mengeluarkan Manifest: PT. Bahtera Permata Wahana. SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2007 & 2008 (Fotokopi)	1) PT. TjiwiKimiaTbk 2) Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	84.862.000 6.174.400 91.036.400 Dokumen yang menyertai invoice dan BL, 08/04/08

- e. Pemberitahuan Kedatangan/Keberangkatan kapal tertanggal 11 Agustus 2008 diketahui bahwa Kapal KM. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan ijin trayek Transport Nomor AT551/18 /10/14/08 tanggal 31 Oktober 2008 rencana bongkar nihil, rencana muat Pulp 600 Adt dan rencana debarkasi (penurunan) penumpang: tidak ada, rencana embarkasi (pemberangkatan) penumpang: tidak ada;
- f. Hasil wawancara bermaterai antara Amin Supriyadi (pemeriksa pajak) dengan Sadewo (pegawai perusahaan) yang dilakukan pada hari rabu tanggal 27 April 2011 diperoleh keterangan sebagai berikut:
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memuat barang dari 1 (satu) pelanggan/pemakai jasa dalam 1(satu) trip perjalanan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah dan tidak diijinkan untuk memasukkan barang lain milik pihak lain dalam 1 (satu) trip perjalanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukan perjanjian hanya melalui telepon dan menggunakan berita acara dalam satu perjalanan;

3. 3. Bahwa pada saat persidangan, Majelis Hakim meminta untuk dilakukan uji bukti dengan hasil pengujian sebagai berikut:

☐ Dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding adalah:

☐ Bahwa Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait dengan dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

- Dokumen berupa manifest yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa fotocopy, dokumen asli belum diberikan.
- Dari bukti yang diberikan bahwa sepanjang F.C. manifest adalah benar, nampak bahwa untuk bulan Agustus 2007, September 2007, April 2008 dan Mei 2008, terdapat 2 konsumen shippers/pengirim dalam 1 manifest dengan besaran jasa yang diterima:

Bulan Agustus 2007	:	Rp111.412.240
Bulan September 2007	:	Rp60.991.957
Bulan April 2008	:	Rp91.036.400
Bulan Mei 2008	:	Rp281.424.400

- Selain dokumen yang disebut dalam uji bukti ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan dokumen lainnya.

☐ Bahwa pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

- Pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menjelaskan bahwa Bukti Perjanjian Lisan hanya didasarkan pada Surat Hasil Wawancara Sdr. Sadewo tanggal 27 April 2011;
- Pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan Berita Acara dalam Satu



Perjalanan" sebagaimana tercantum dalam poin 2 Surat Hasil Wawancara, adalah bukan berupa "Berita Acara";

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti-bukti yang membuktikan adanya lebih dari 1 (satu) customer dalam satu pelayaran/trayek sehingga apa yang dinyatakan dalam hasil wawancara Sdr. Sadewo adalah tidak benar;
- Bahwa atas bukti SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2007 dan 2008, dapat dibuktikan bahwa Sdr. Sadewo (yang memberikan keterangan pada Surat Hasil Wawancara) bukanlah sebagai pengurus dan/atau karyawan dari PT. Anugerah Pasific Jaya;

Catatan:

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menyusulkan bukti-bukti invoice yang menunjukkan pembayaran customer berdasarkan jumlah kuantum (MT, M, Bales) dikalikan harga satuan, bukan berdasarkan Freigh Charter atau per Trayek Pelayaran;

3. 4. Bahwa dalam persidangan, para pihak menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

☐ Penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

- 1) bahwa alasan banding yang dipergunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah bertolak belakang/berlawanan/bertentangan dengan pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri dalam tahapan proses penyelesaian keberatan, yaitu :
 - o saat banding, alasan yang dipergunakan adalah bahwa aktivitas usaha/jasa yang dihasilkan adalah bukan merupakan obyek PPN, dimana sebelumnya,
 - o saat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan/ menyatakan bahwa aktivitas usaha/jasa yang dihasilkan adalah merupakan obyek PPN, sesuai dengan Surat Penjelasan Tertulis Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) nomor S-7294/PJ.07/2013 tanggal 20 Nopember 2013;

- 2) Bahwa sengketa di Masa Pajak Juni 2008, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan "usaha pemohon merupakan Jasa di bidang Angkutan Umum yang tidak dikenakan PPN" berbeda dengan data yang disampaikan pada SPT PPN Masa Juni 2008 yang melaporkan bahwa "tidak ada usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak dikenakan PPN", hal ini merupakan petunjuk bahwa Jasa yang dihasilkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan obyek PPN dan Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan jasa Angkutan Umum di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 527/KMK.03/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 28 /PMK.03/2006;
 - 3) Sesuai dengan penjelasan ini dan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada sidang pemeriksaan sengketa sebelumnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa Jasa angkutan laut yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Jasa Kena Pajak yang dikenakan PPN atau tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Angkutan Umum di Laut, sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sudah benar;
- ☐ Penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Kuasa Hukum pemohon dengan ini menyatakan keberatan dan menolak atas dokumen berupa hasil wawancara yang dibuat Sdr. Sadewo dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding) yang diwakili oleh Sdr. Amin Supriyadi (NIP. 19761110199031001) yang dinyatakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai dasar penetapan hasil pemeriksaan dikarenakan Sdr. Sadewo: i. Hasil Wawancara Sdr. Sadewo tidak prosedural dan cacat hukum dan Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan; ii. Bukan sebagai Pengurus/Wakil; iii. Bukan sebagai Kuasa;

- Bahwa atas keterangan Sdr. Sadewo tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga tidak pernah memberikan permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur di dalam peraturan Perpajakan berupa :

- UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 35 ayat (1) dan (2);
- Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada Bab VIII tentang Kuasa Wajib Pajak, Rahasia Jabatan, dan Permintaan Keterangan pada Pihak Ketiga; Pasal 49, Pasal 54 ayat (1);
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. PMK-201/PMK.03/2007 Pasal 1 dan 2;
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-19/PJ/2008.

sehingga atas keterangan yang diberikan Sdr. Sadewo yang berkaitan dengan aktivitas usaha pemohon juga cacat formal, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dijadikan alat bukti persidangan.

- Bahwa hasil wawancara Sdr. Sadewo dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 27 April 2011 yang ditandatangani Sdr. Sadewo dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berupa Hasil Wawancara yang berdasarkan wawancara dan Sample Manifest dan Port clearance yang dijadikan alat bukti persidangan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali (semula Pemohon Banding) menambahkan penjelasan dan menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa suatu Alat Bukti harus Memenuhi Syarat Formil (sudah dijelaskan sesuai surat pemohon No. 01 s.d 18/Tanggapan HW APJ/X/13 tanggal 30 Oktober 2013);
- b. Bahwa suatu Alat Bukti juga harus Memenuhi Syarat Materiil, dimana suatu keterangan yang diberikan harus saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan alat bukti lain berdasarkan Pasal 1906 KUH Perdata dan Pasal 170 HIR (Herziene Inlandsch Reglement);

Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa, keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian atau mutual confirmity antara yang satu dengan yang lain. Artinya antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, terdapat kecocokan, sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan.

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tidak pernah ada perjanjian baik lisan dan/atau tertulis dalam kegiatan usaha penyerahan jasa angkutan laut yang dilakukan pemohon pada Masa Pajak Desember 2007 dengan nilai peredaran usaha sebesar Rp. 1.383.083.090,00;

Bahwa pemohon dalam melakukan penarikan biaya atau pemungutan bayaran biaya angkut kepada konsumen atas penyerahan jasa angkutan laut yang dilakukan semata-mata didasarkan pada suatu pricelist (daftar harga), dimana konsumen membayar berdasarkan Volume atau Quantum Barang (satuan M3, MT, Sling, dan Kg) dikalikan nilai satuan harga bukan berdasarkan time charter;

Bahwa dengan penetapan biaya angkut seperti tersebut di atas, membuktikan dalam 1 (satu) kali perjalanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutan di laut berapapun jumlah volume/quantum barang milik 1 (satu) konsumen tetap akan diangkut/diberangkatkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan dipungut biaya berdasarkan pricelist yang sudah ditentukan dan tidak diperlukan atau tidak ada perjanjian lisan dan/atau tertulis antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan konsumen;

Bahwa dengan metode penetapan atau pemungutan bayaran biaya angkut seperti tersebut di atas, membuktikan aktivitas usaha pemohon adalah murni jasa angkutan umum di laut (siapapun konsumen dan apapun jenis barangnya) sehingga tidak terutang PPN dan kegiatan usaha pemohon juga tidak memenuhi syarat kumulatif yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan RI No.28/PMK.03/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 Pasal 5 ayat (1).

3. 5. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, termasuk hasil penelusuran dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), serta mempertimbangan ketentuan perpajakan yang ada dengan ini Pemohon PK (semula Terbanding) sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- ☐ Bahwa berdasarkan penelusuran dalam SIDJP diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 19 Juni 2008, dan bergerak dalam bidang angkutan laut domestik umum liner untuk penumpang (KLU: 50111)
- ☐ Bahwa Pemohon Banding melaporkan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Juni 2008.
- ☐ Bahwa dalam SPT Masa PPN tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan bahwa jasa angkutan laut yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai jasa kena pajak
- ☐ Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN



Pasal 1 angka (15)

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 3A ayat (1)

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

- ☐ Bahwa dalam surat keberatannya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri yang meminta secara sukarela untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, sehingga dengan demikian pada dasarnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui bahwa jasa angkutan laut yang diserahkan merupakan jasa kena pajak.
- ☐ Bahwa system perpajakan di Indonesia menganut asas self assessment system, sehingga Wajib Pajak menghitung, melaporkan dan bertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- ☐ Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan, bahwa dalam SPT PPN Masa Pajak Juni 2008 dan seterusnya, yang telah dilaporkan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa "tidak ada usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak dikenakan PPN". (halaman 26 putusan)



- ❑ Bahwa pada tahun 2011, dilakukan pemeriksaan untuk tahun pajak 2007 dan 2008, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan-Pemeriksaan Khusus (all taxes) atas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tahun pajak 2007, kemudian menetapkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan per tahun 2007, sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-140/WPJ.24/KP.0105/2011 tanggal 28 Juni 2011.
- ❑ Bahwa berdasarkan data-data dan keterangan yang diperoleh pada saat pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kemudian melakukan koreksi DPP atas Penyerahan BKP/JKP karena tidak sesuai dengan Pasal 5 KMK Nomor 527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember 2003 jo. PMK Nomor 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006.
- ❑ Bahwa dalam Pasal 5 KMK disebutkan:
 - (1) Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan jasa Angkutan Umum di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah penyerahan Jasa Angkutan Laut yang dilakukan dengan cara:
 - a. ada perjanjian lisan atau tulisan; dan
 - b. Kapal dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan atau untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan Laut, dalam satu perjalanan (trip).
- ❑ Bahwa pada saat pemeriksaan, diperoleh keterangan Hasil wawancara bermaterai antara Amin Supriyadi (pemeriksa pajak) dengan Sadewo (pegawai perusahaan) yang dilakukan pada hari rabu tanggal 27 April 2011 diperoleh keterangan sebagai berikut:
 - Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memuat barang dari 1 (satu) pelanggan/pemakai jasa dalam 1(satu) trip perjalanan,



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah dan tidak diijinkan untuk memasukkan barang lain milik pihak lain dalam 1 (satu) trip perjalanan;

- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukan perjanjian hanya melalui telepon dan menggunakan berita acara dalam satu perjalanan;
- ❑ Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempermasalahkan status/kedudukan Sdr. Sadewo, yang bukan merupakan wakil ataupun kuasa dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun keterangannya dijadikan alat bukti oleh Tergugat.
- ❑ Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2013, bahwa Sdr. Sadewo merupakan orang yang menyerahkan dokumen selama pemeriksaan.
- ❑ Bahwa keterangan yang diperoleh dari Sdr. Sadewo tersebut bukanlah semata-mata alat bukti yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Alat bukti lain yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah pernyataan dalam SPT Masa PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang menyatakan bahwa “tidak ada usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak dikenakan PPN”, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disampaikan pada saat pemeriksaan.
- ❑ Bahwa pada saat proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memberikan Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan tanpa nomor tanggal 30 Agustus 2002, yang ditandatangani oleh Sdr. Widi Argono (Direktur), yang secara garis besar menyampaikan:
 - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mendaftarkan diri dengan



sukarela (bukan ditetapkan Secara Jabaian) untuk mendapatkan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena pajak tentunya tidak selayaknya diterbitkan Surar Ketetapan Pajak unluk Tahun pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menjelaskan alasan kenapa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meminta untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yakni bahwa memang ada suatu klausa perkecualian dalam KMK No. 527/KMK.03/2003 yang menyiratkan adanya kewajiban perusahaan untuk memungut PPN.
- Bahwa pada saat persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana dijabarkan dalam angka 3 di atas, dan berdasarkan dokumen tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan adalah sample manifest bulan Agustus 2007, September 2007, April 2008 dan Mei 2008.
 - Bahwa sengketa ini adalah terkait dengan Masa Pajak Desember 2007, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sama sekali tidak menyampaikan dokumen-dokumen terkait dengan penyerahan jasa angkutan umum yang dilakukan pada bulan Desember 2007.
 - Bahwa dokumen yang disampaikan merupakan sample, yang tidak sepenuhnya menunjukkan kondisi yang sebenarnya atas penyerahan jasa angkutan umum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Masa Pajak Desember 2007.
 - Bahwa dengan demikian, dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak relevan untuk dijadikan alat bukti dan



tidak seharusnya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus sengketa ini.

- ☐ Bahwa berdasarkan uraian di atas, perlu ditegaskan kembali bahwa pada saat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui bahwa jasa angkutan umum yang diserahkan merupakan jasa kena pajak. Hal ini dibuktikan dengan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mendaftarkan diri dengan sukarela untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan kemudian memungut PPN dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2008 dan seterusnya (setelah dikukuhkan sebagai PKP).
- ☐ Bahwa dalam proses banding, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum, mengingkari pernyataannya dalam Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan (yang ditandatangani oleh Direktur Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) dan mengajukan banding dengan alasan "jasa angkutan umum yang diserahkan bukan merupakan jasa kena pajak".
- ☐ Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan dokumen yang berupa sample, yang tidak sepenuhnya menunjukkan kondisi yang sebenarnya atas penyerahan jasa angkutan umum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

3. 6. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan:

- Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat hasil wawancara tanggal 27 April 2011 yang ditandatangani Sdr. Sadewo dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berupa Hasil Wawancara yang berdasarkan wawancara dan Sample Manifest dan Port clearence yang menyatakan : "Pemohon hanya memuat barang dari 1 (satu) pelanggan/pemakai saja dalam 1 (satu) trip perjalanan. APJ tidak pernah dan tidak diijinkan untuk memasukan barang lain milik pihak lain dalam 1 (satu) trip



perjalanan" tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (halaman 43 putusan)

- Bahwa uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Perusahaan Angkutan Laut yang memindahkan barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain dan untuk sengketa ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terbukti mengangkut barang milik dari beberapa perusahaan dan tidak hanya milik satu perusahaan saja, dengan demikian jasa yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pelayaran umum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga jasa pengangkutan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai; (halaman 48 putusan)

Bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, keterangan Sdr. Sadewo bukanlah semata-mata alat bukti yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri yang mendaftarkan diri secara sukarela untuk dikukuhkan sebagai PKP, sehingga dengan kata lain Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyadari dan mengakui bahwa jasa angkutan umum yang diserahkan merupakan jasa kena pajak. Bahwa alat bukti terkuat adalah SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2008 (dilaporkan setelah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak), mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SPT tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan “tidak ada usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak dikenakan PPN”.

- Bahwa Bahwa dalam Pasal 78 UU Pengadilan Pajak disebutkan “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.
 - Bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menggambarkan dan menunjukkan kondisi yang sebenarnya, mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menunjukkan manifest untuk bulan-bulan tertentu saja (sample), yang menunjukkan bahwa penyerahan jasa angkutan umum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak diberikan hanya kepada satu pihak/perusahaan.
 - Bahwa dalam dokumen tersebut sama sekali tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya atas penyerahan jasa angkutan umum untuk Masa Pajak Desember 2007, sehingga dokumen tersebut tidak relevan untuk digunakan sebagai alat bukti dalam sengketa ini.
 - Bahwa dengan dipertimbangkannya dokumen yang tidak relevan dengan sengketa oleh Majelis Hakim, maka dalam putusan ini tidak mengandung kebenaran materiil atas sengketa terkait dengan koreksi DPP atas penyerahan jasa Masa Pajak Desember 2007;
3. 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan fakta yang ada serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan dengan demikian putusan Majelis Hakim yang telah membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang mengamanatkan kepada

Halaman 27 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1237/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim untuk memutus sesuai fakta yang ada serta mengacu pada ketentuan perpajakan yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, dan oleh karenanya terdapat cukup alasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak yang menyatakan:
Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 53591/PP/M.VA/16/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang menyatakan:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1399/WPJ.24/2012 tanggal 05 September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2007 Nomor 00119/207/07/603/11 tanggal 06 Juli 2011, atas nama PT Anugerah Pasific Jaya, NPWP 01.918.493.6-603.000, beralamat di Jl. Kalianget 10-12 Blok A-7, Surabaya, sehingga perhitungan pajaknya adalah sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1399/WPJ.24/2012 tanggal 05 September 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2007 Nomor: 00119/207/07/603/11 tanggal 06 Juli 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.918.493.6-603.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu butir 1 mengenai jangka waktu yang berkaitan dengan administrasi proses penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan sedangkan butir 2 mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai berupa penyerahan JKP Masa Pajak Desember 2007 sebesar Rp1.383.083.090,00; yang tidak dipertahankan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori PK oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa penerbitan formal putusan bersifat administrasi semata yang tidak dapat membatalkan putusan, sedangkan substansi jasa pengangkutan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali bukan merupakan obyek PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PK) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2006.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr.Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.

Panitera Pengganti:

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	Rp. 2.489.000,00
Jumlah	Rp. 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 30 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1237/B/PK/PJK/2016